

KESIAPAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM MENGHADAPI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Berbagai kegiatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) terus berlangsung, dimana fokus pembangunan saat ini adalah di kawasan inti pemerintahan yang luasnya sekitar 6.600 hektar. Kawasan inti pemerintahan itu menjadi pusat kegiatan pembangunan utamanya. Di dalam kawasan ini dapat ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN-Hankam.

Adapun infrastruktur utama yang tengah dikembangkan secara progresif pada pembangunan IKN antara lain adalah, area Istana Negara, pembagian kantor Kementerian dan perumahan aparatur sipil negara atau ASN. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah alasan pembangunan Ibu Kota Nusantara

(IKN) dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Februari 2023. Menurut Presiden RI, alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.

“Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan, tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar

pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan, melainkan, pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. “Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah Ibukota yang negara lain tidak memiliki, negara lain tidak memiliki,” tutur Presiden.

Presiden pun meyakini proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan IKN akan menjadi kota pemerintahan. Sedangkan Jakarta, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden RI menyebut Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi.

Sementara itu, dilansir melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri PUPR, Basuki



LAPORAN UTAMA

Hadimuljono meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jumat (28/7/2023). Hingga saat ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 telah mencapai 36% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan.

Dalam tinjauannya, Menteri Basuki menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur IKN berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, bahkan ada beberapa progres pembangunannya yang lebih cepat dari rencana. Antara lain pembangunan bangunan Gedung Istana Negara, Kantor Presiden dan Penataan Sumbu Kebangsaan.

“Di depan kawasan Istana Presiden terdapat plaza dan lapangan upacara. Kita harapkan akhir Desember 2023 tempat upacaranya sudah selesai, sedangkan Istana Negara dan Kantor Presiden akan selesai pada Juli 2024. Sehingga Insya Allah jika Presiden berencana upacara 17 Agustus 2024 sudah bisa,” ungkap Menteri Basuki. “Kami fokus untuk pengembangan KIPP di Zona 1A karena Kementerian PUPR mendapat amanah untuk pembangunan infrastruktur dasar menggunakan dana APBN. Anggarannya sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini merupakan modal bagi Otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi”, ungkapnya.

Lebih lanjut, Deputy Bidang Transformasi Hijau dan Digital



Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Kamis, 23 Februari 2023. Sumber : www.presidentri.go.id

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Prof. Mohammed Ali Berawi pada Rapat Koordinasi Penataan Arsip Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan bahwa pembangunan IKN dimasukkan dalam 5 tahap, dimana tahap pertama (2020-2024), akan dibangun istana negara, perkantoran kementerian, hunian pejabat negara dan pegawai, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Prof. Mohammed Ali Berawi menyampaikan bahwa sekitar 65% wilayah IKN akan menjadi wilayah *tropical forest* untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia. “Yang dibangun saat ini adalah wilayah area hutan produksi. *Baseline* kita tercapai artinya apa? Kita akan melakukan reforestrasi, *mentawir nursery*, temen-temen KLHK menyiapkan 15 juta bibit pohon untuk ditanam kembali, direforestrasi kembali di IKN. 65% *tropical forest*, 10% *green air*. Untuk *food production*, untuk taman-taman yang akan dibangun dan hanya

25% dibangun kotanya. Kalau 75% menjadi karbon *zink*, menyerap CO_2 . 25% nya kita kontrol emisi karbonnya, maka karbon netral, Insya Allah akan tercapai sebelum 2045. Ini *masterplan* nya IKN”, terang Ali Berawi.

Pemindahan IKN tidak hanya berdampak pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan, namun juga berdampak terhadap penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Hal itu disampaikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto pada Rapat Koordinasi Penataan Arsip Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Ballroom Magzi, Hotel Grandkemang, Jakarta, (23/02).

“Ketika kita pindahan, keluarga kita pindah, rumah kita pindah, itu pasti ada yang kececer. Kemudian kita sering mengalami organisasi kita pindah juga ada yang kececer. Nah apalagi kalau sebuah ibukota yang pindah jaraknya yang jauh lagi. Ini

perlu sangat dipersiapkan dengan sangat matang, termasuk dengan kearsipan, karena arsip membawa efek hukum, membawa efek kinerja, membawa efek yang beruntun ke berbagai masalah bisa terjadi di bidang kearsipan. Tapi kita tidak boleh patah semangat, kita tetap semangat optimis kita akan tuntaskan program ini dengan sekuat tenaga kita”, ungkap Imam.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara salah satunya, mengakibatkan perpindahan perangkat pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga ke Ibu Kota baru. Perpindahan ini mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga baik sumber daya manusia, aset yang bergerak, bukti administrasi kegiatan pemerintahan, dan lain-lain. Salah satu sumber daya Kementerian/Lembaga yang harus diselamatkan dan dikelola agar dapat digunakan secara berkelanjutan di Ibu Kota baru adalah arsip.

Imam Gunarto menyampaikan bahwa ANRI bersama K/L yang akan pindah ke IKN harus menyamakan hati dan pikiran, gerak langkah dan aksi dalam membangun kearsipan, khususnya menuju IKN. Pekerjaan besar dan kolosal ini melibatkan



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jumat (28/7/2023). Sumber : www.pu.go.id

banyak K/L yang akan pindah, sehingga menjadi momen bersejarah yang akan dikenang anak cucu kita. “Proses ini harus dilaksanakan secara kolaboratif, tidak hanya ANRI dengan K/L saja tetapi dengan swasta, perguruan tinggi, dan komunitas bersama-sama bersinergi,” terang Imam Gunarto.

Lebih lanjut Imam menambahkan, tugas kita bersama adalah menata dan mendigitalisasi arsip dari 70 K/L yang akan pindah ke IKN dan menjamin arsip statis, terjaga, dan vital dapat terselamatkan. Kemudian menjamin arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak bernilai guna dimusnahkan sesuai prosedur. Ini tak lain untuk menjamin arsip, menjaga keberlanjutan administrasi kementerian/lembaga di IKN. “Momen perpindahan menuju IKN ini dapat menjadi momen tertib arsip, transformasi digital dan penyelamatan Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang

efektif,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Prof. Mohammed Ali Berawi sangat mendukung terhadap transformasi digital kearsipan di IKN dalam mewujudkan pemerintahan yang modern.

“Pertama kali harus mempunyai database yang kuat, harus memiliki sistem kearsipan yang bagus, kenapa? karena sekarang teknologi adalah 4 (empat) hal yang harus dipenuhi, pertama kita harus adaptif, kita harus produktif, kita harus diplomatik, dan yang terakhir kita harus kompetitif. Kenapa ini penting? karena kalau bicara data, indeks kompetitif republik kita, tahun ini menjadi peringkat 42 dari seluruh negara. Salah satu indikator dari *ranking top universe* ini adalah efektivitas, efisiensi pemerintahan. Bagaimana *decision making* harus dibuat secara cepat, harus dibuat

LAPORAN UTAMA

secara responsif”, ungkap Mohammed Ali Berawi. “Oleh karena itu, saya sangat mendukung Kepala ANRI. Mari kita bersama-sama bangun sistem digital kearsipan”, tambahnya.

Kemudian, Imam Gunarto berharap dengan pemindahan IKN ini, dapat menjadi momentum dalam membangun penyelenggaraan kearsipan yang modern. “Dan tentu saja bagi Arsip Nasional, 2024 itu momen kita semua untuk mencapai tertib arsip dengan kualitas yang baik dan transformasi kita bisa dijalankan karena nanti bapak dan ibu tidak lagi berkomunikasi kedinasan surat-menyurat dengan email, dengan whatsapp tapi dengan satu aplikasi, aplikasi pemerintah yang Insya Allah keamanannya lebih terjamin karena tidak keluar dari sistem pemerintah. Aplikasi Srikandi ini sistem internal pemerintah yang menjamin seluruh aparatur pemerintah bisa berkomunikasi kedinasan menjalankan program-programnya itu secara aman di dalam satu lingkungan aplikasi pemerintah bukan aplikasi yang terbuka. Jadi ini aplikasi yang tertutup untuk jaringan pemerintah. Dan akhirnya jangan sampai proses pemindahan ibukota ini, kita menjadi kehilangan sejarah karena arsipnya ada yang hilang atau tercecer”, ujarnya.

Imam mengajak kepada seluruh pengemban tugas bidang kearsipan untuk bahu-membahu menyukseskan penataan arsip kementerian/Lembaga dalam menghadapi persiapan pemindahan IKN.

“Mari kita bersama, berkerja sama, kerja kolosal, kerja birokratif, tidak hanya ANRI dengan IKN tetapi nanti akan melibatkan swasta. Saya



Kepala ANRI, Imam Gunarto



Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Prof Mohammed Ali Berawi

”Momen perpindahan menuju IKN ini dapat menjadi momen tertib arsip, transformasi digital dan penyelamatan Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang efektif”

sudah membentuk satu komunitas perusahaan swasta partisipan jumlahnya 96 perusahaan kearsipan yang nanti kita akan timbang semua. Kita sedang proses akreditasi,

proses sertifikasi kepada sumber daya di perusahaan tersebut. Saya ingin perusahaan-perusahaan yang membantu bapak ibu ketika proses pematangan dan pembinaan arsip ini dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang memang terqualifikasi dan itu akan dikontrol oleh ANRI, supaya nanti arsip yang ditata sesuai dengan standar”, terang Imam.

Akhirnya, melalui program penataan arsip kementerian/Lembaga dalam menghadapi persiapan pemindahan IKN ini, diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui program penataan arsip ini, diharapkan dapat menjaga dan melestarikan peradaban dan sejarah perjalanan bangsa secara utuh, terpercaya dan komprehensif.